



**PEMERINTAH KABUPATEN
MANGGARAI BARAT**

2021 - 2026

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERIODE 2021 - 2026



Indonesia G20 Presidency
Recover Together
Recover Stronger

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Sernaru – Kel.Wae Kelambu - Labuan Bajo 86554



enchanted
labuan bajo

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 dapat disusun sesuai dengan amanat dan arahan pembangunan daerah. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 ini disusun dengan mengacu pada agenda pembangunan daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021—2026. Selain itu, juga mengacu pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan memasukkan unsur-unsur perkembangan teknologi di dalam melakukan peta strategi pengelolaan, penyelenggaraan, hingga pemanfaatan di bidang TIK.

Dengan terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, telah mendorong kebutuhan digitalisasi menjadi semakin krusial. Pada era new normal, kebutuhan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer masyarakat. Para pelaku usaha, industri dan sektor ekonomi terdesak untuk bertransformasi digital agar bisnisnya dapat terus beroperasi. Situasi ini mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan percepatan transformasi digital pada 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021—2026 diarahkan untuk mencapai percepatan penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat, percepatan transformasi digital pemerintahan, dan masyarakat, dan peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi publik. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, target kinerja, dan kerangka

pendanaan, yang merupakan acuan utama dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat selama 5 (lima) tahun ke depan yakni tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 diharapkan dapat meningkatkan sinergitas dan keberlanjutan perencanaan program dan kegiatan dari seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika pada khususnya, dan pembangunan daerah Kabupaten Manggarai Barat pada umumnya. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam proses penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 ini.

Labuan Bajo, 31 Desember 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Manggarai Barat,



Paulus Setahu, S. Sos

Pembina Tk. I

NIP. 196806292000121004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 menyajikan informasi capaian kinerja sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021.

Hasil capaian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan secara umum telah sesuai dengan yang ditargetkan. Rata-rata capaian sasaran strategis tersebut adalah 100%. Total anggaran untuk melaksanakan sasaran-sasaran tersebut sebesar Rp 5.948.357.987,00 dan dilakukan perubahan pada APBD-P menjadi Rp. 4.482.802.647,00. dengan serapan sebesar Rp. 4.397.998.621,00 atau 98,11%. Capaian kinerja sasaran dan capaian realisasi anggaran tersebut menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran.

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 telah ditetapkan 4 sasaran strategis yang harus dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Rata-rata capaian kinerja berdasarkan indikator yang ditetapkan menunjukkan presentase capaian kinerja sebagai berikut:

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA 2021	KET
1	2	3		4			
1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi, Buku Kabupaten Manggarai Barat dalam angka dan Buku PDRB	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	Ada/TA	Ada	Ada	100	
		Tersedianya Buku Manggarai Barat Dalam Angka	Ada/TA	Ada	Ada	100	
		Tersedianya Buku PDRB	Ada/TA	Ada	Ada	100	
2.	Terwujudnya Perangkat Daerah yang menggunakan sistem persandian	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Sandi dalam Komunikasi	%	37	10	27	
3.	Tersedianya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) tingkat Kecamatan	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM ditingkat Kecamatan	Kelompok	51	15	29,4	

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA 2021	KET
1	2	3		4			
4.	Tersedianya akses Komunikasi dan Informasi	Persentase Desa/ Kelurahan yang Terakses Telekomunikasi	%	100	97	97	
		Persentase Desa/ Kelurahan yang Bisa diakses RSPD	%	100	95	95	
		Persentase OPD yang Menerapkan e-Government	%	79,55	90	113	
		Persentasi Wilayah Kecamatan Terlayani Akses Internet	%	100	100	100	

Jika dilihat dari rata-rata persentase capaian kinerja indikator kinerja diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah **baik** atau kategori **tinggi**

Secara garis besar, hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut :

A. Internal:

1. Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat;
3. Terbatasnya kemampuan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2021 baik untuk kegiatan pembangunan baru maupun untuk rehabilitasi/perawatan sarana prasarana Komunikasi dan informatika yang ada;
4. Keterbatasan ketersediaan anggaran ini ditambah dengan rasionalisasi anggaran di beberapa kegiatan yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 yang mengakibatkan beberapa kegiatan dengan sangat terpaksa harus mengalami pengurangan anggaran yang sangat besar.
5. Kurangnya koordinasi internal aparatur dalam pelaksanaan tugas.

B. Eksternal

1. Masih rendahnya pemahaman instansi lain berkaitan dengan lingkup dan cakupan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika;

2. Topografi manggarai barat yang berbukit-bukit sehingga jangkauan sinyal RSPD menjadi sulit menembus daerah-daerah yang paling terpolosok.

Adapun upaya penanganan masalah meliputi:

1. Meningkatkan kemampuan keahlian personil melalui pengiriman personil untuk mengikuti diklat teknis serta mengusulkan penambahan aparatur yang memahami tentang IT;
2. Memaksimalkan anggaran yang ada (APBD Kabupaten Manggarai Barat) dan mengusulkan (membuat proposal) kepada Pemerintah Pusat untuk Pembangunan Menara di Daerah-daerah blank spot untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan rutin sesuai dengan arahan RENSTRA dan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat.;
3. Menyusun beberapa regulasi yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, Retribusi Menara Telekomunikasi, Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait secara rutin;
5. Memaksimalkan aparatur yang ada untuk lebih meningkatkan produktivitas kerjanya dan meningkatkan disiplin serta meningkatkan koordinasi internal dalam pelaksanaan tugas;

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. LATAR BELAKANG	1
I.2 LANDASAN HUKUM	2
I.3 MAKSUD & TUJUAN	8
I.4 SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN	
INFORMATIKA	11
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11
1. Tugas Pokok	13
2. Fungsi	13
2.2 SUMBER DAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	22
1. Tugas Pokok	13
2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI	
DAN INFORMATIKA	26
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN	
PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	30
2.4.1 Tantangan	30
2.4.2 Peluang	31

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 33**

- 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS
DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA 33
- 3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH 35
- 3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN/LEMBAGA DAN
SKPD PROVINSI 43
- 3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS 45
- 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS 47

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 50

- 4.1 TUJUAN JANGKA MENENGAH DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA 50
- 4.1 SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA 50

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 52**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 54****BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 66****BAB IV P E N U T U P 72****LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	23
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	23
Tabel 2.3 Daftar Sarana - Prasarana	24
Tabel 2.4 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat 2016-2021	27
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika 2016-2021.....	29
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Urusan Komunikasi dan Informatika...	33
Tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan Urusan Statistik	34
Tabel 3.3 Pemetaan Permasalahan Urusan Persandian.....	35
Tabel 3.4 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	42
Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	44
Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	47
Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran DKomunikasi dan Informatika.....	51
Tabel 4.2 IKU Dinas komunikasi dan Informatika	51
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	53
Tabel 6.1 Rencana Program Dinas Komunikasi dan Informatika	56
Tabel 6.2 Rekapitulasi Anggaran Rencana Program, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika	58
Tabel 6.3 Rekapitulasi Anggaran Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika	59
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	66
Tabel 7.2 Indikator Menurut Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome Pemerintah Daerah	67

Tabel 7.3 Indikator Menurut Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	68
Tabel 7.2 Indikator Menurut Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome Pemerintah Daerah	67
Tabel 7.2 Indikator Menurut Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome Pemerintah Daerah	67

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1. Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan renstra PD	2
Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi	12



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangannya dan berdasarkan kondisi serta potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Rencana pembangunan Kabupaten Manggarai Barat juga menekankan pentingnya peran TIK dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik. Inovasi TIK juga dilakukan dalam rangka mewujudkan misi kelima Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani

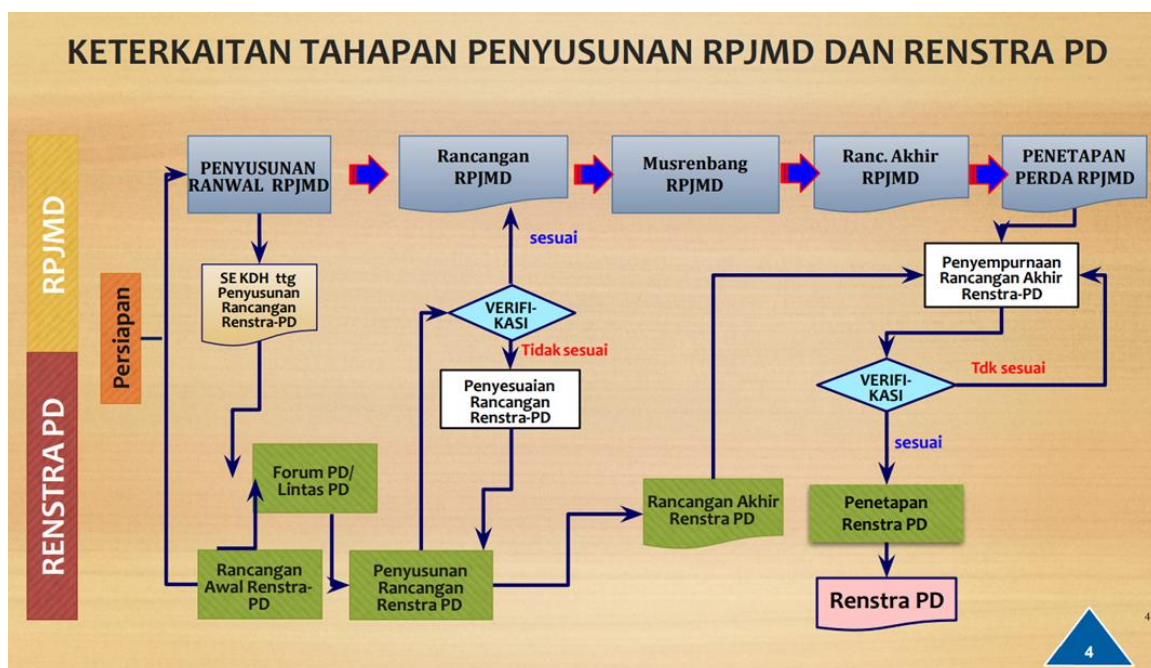
Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan; yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan kondisi dan potensi daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Bidang komunikasi dan informatika di era digital ini sangatlah penting, kehadirannya dalam bentuk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sudah menjadi tuntutan kebutuhan baik di lingkungan pemerintahan, swasta maupun masyarakat dan individu yang pada akhirnya akan mewujudkan konsep masyarakat informasi.

Gambar 1.1



1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, mencakup:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan



Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);



- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);



- Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 10);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024;
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);



- Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 Nomor 9);
- Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 221).
- Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 - 2026;
- Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor: 75 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas daerah Kabupaten Manggarai Barat.



1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis adalah untuk memberikan gambaran yang lebih kongkrit mengenai pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat, sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian monitoring dan evaluasi. Pedoman renstra ini memuat pula tahapan dan indikator kinerja program dan kegiatan pada setiap tahunnya untuk memastikan perwujudan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat di bidang Komunikasi dan Informatika dapat terealisasi lebih cepat dan berkualitas.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra adalah untuk memberikan arah dan strategi pembangunan yang menjadi kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang akan dilaksanakan dengan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan. Lebih lanjut tujuan disusunnya Renstra adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan selama lima tahun kedepan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Manggarai Barat.
- 2) Menetapkan program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 3) Menetapkan sasaran maupun target-target pembangunan dengan indikator yang terukur.



- 4) Menjamin konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan komitmen yang telah disepakati.
- 5) Sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan instrumen pertanggungjawaban.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2021-2026 ini terdiri dari 7 (tujuh) bagian sesuai dengan Permendagri No 86 tahun 2017, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika D
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika



BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan
- 4.2. Sasaran

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

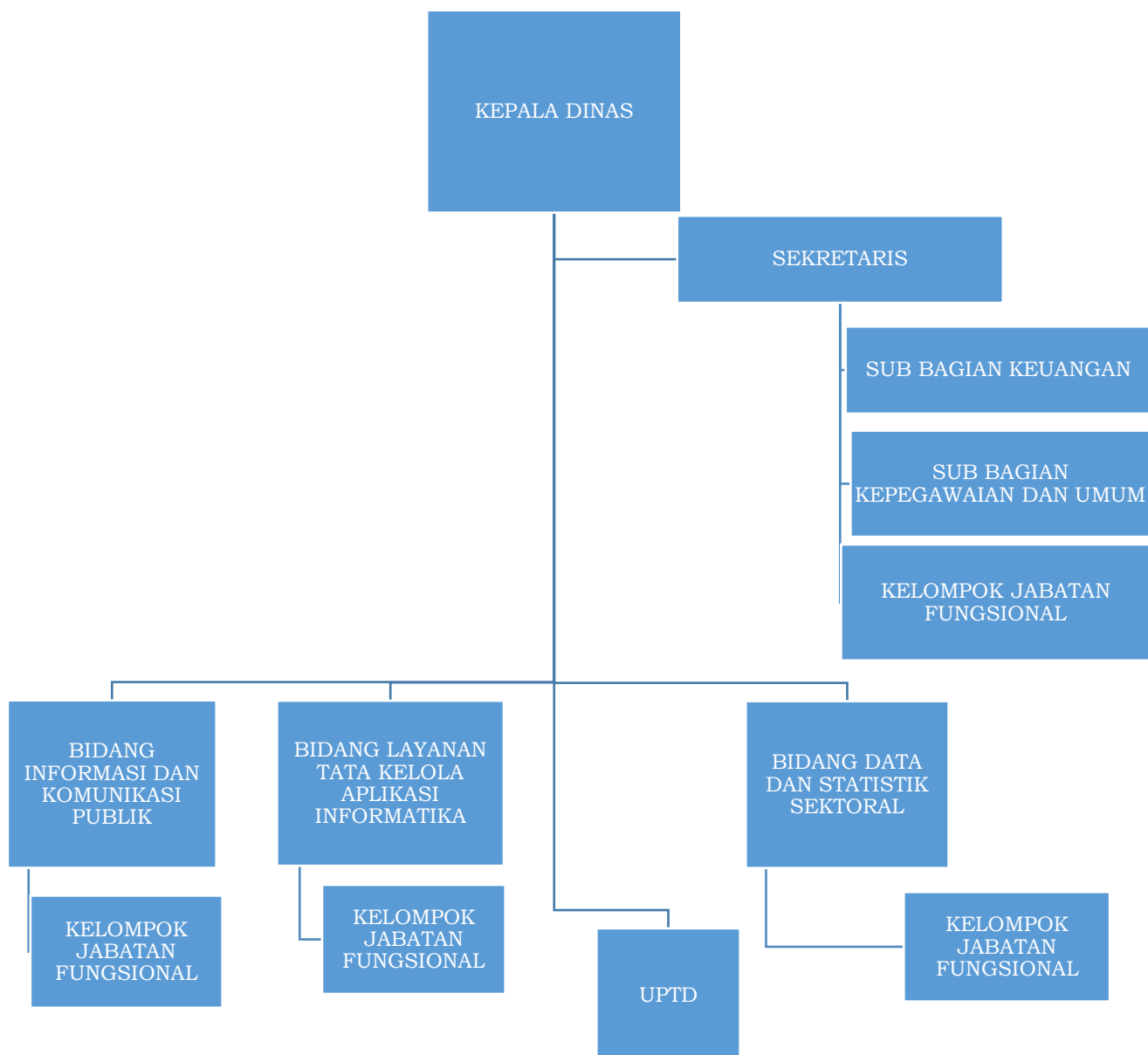
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat memiliki Fungsi, Tujuan dan susunan organisasi yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 75 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Adapun susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Peraturan Bupati diatas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian:
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian kepegawaian dan umum;
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
4. Bidang Layanan Tata Kelola Aplikasi Informatika
5. Bidang Data dan Statistik Sektoral; dan
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Bagan struktur organisasi dan tata kerja Dins Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Komunikasi dan Informatika





1. Tugas pokok

Dinas Komunikasi dan Informatika yang dipimpin oleh Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintah bidang Persandian dan urusan pemerintah bidang Statistik.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah;
- b. penyelenggaraan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah;
- c. penyelenggaraan pengelolaan e-government lingkup pemerintah daerah;
- d. penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah;
- e. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah;
- f. penyelenggaraan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
- g. penyelenggaraan pelaksanaan administrasi dinas;
- h. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian jabatan fungsional;
- i. pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik; dan

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi.

Tugas Pokok dan Fungsi dari sekretariat dan setiap bidang yang ada di dalam Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai yaitu:

1 Sekretariat

Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika yang dipimpin oleh sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan pembinaan administrasi yang meliputi urusan perencanaan program, pelaporan dan keuangan, kepegawaian dan umum.

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan rencana dan kebijakan teknis berdasarkan kebijakan SKPD;
- b. Penyelenggaraan dan pengelolaan urusan kesekretariatan meliputi urusan program, keuangan dan pelaporan serta urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang pada SKPD;
- d. Pelaksanaan administrasi kerumahtanggaan, pelaksanaan perjalanan dinas dan administrasi umum lainnya;
- e. Pelaksanaan penataan arsip/perpustakaan, penertiban administrasi dan persuratan SKPD;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan urusan program, keuangan dan pelaporan serta urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan;
- g. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, kerja sama, hubungan masyarakat pada SKPD;
- h. Pembinaan dan tata laksana SKPD;



- i. Pembinaan pengelolaan barang milik daerah/Negara pada SKPD;
 - j. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan program/kegiatan/anggaran SKPD dan penyusunan laporan-laporan kegiatan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan SKPD;
 - k. Pengkoordinasian, pemantauan, monitoring, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian kinerja SKPD;
 - l. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
-
1. Subbagian keuangan, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dokumen perencanaan dan kerangka regulasi Dinas Komunikasi dan Informatika berkaitan program dan perlengkapan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan dokumen RKA, DPA, Perubahan DPA pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c. menyiapkan, melaksanakan pengolahan data, pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan dinas komunikasi dan informatika;
 - d. melaksanakan kegiatan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan dinas komunikasi dan informatika;
 - e. meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP) UP, GU, TU, LS, Gaji dan Tunjangan PNS dan LS pengadaan barang dan jasa;



- f. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran (SPM) UP, GU, TU, LS, gaji dan tunjangan PNS dan LS pengadaan barang dan jasa sesuai SPP yang diajukan;
 - g. melakukan verifikasi harian atas penerimaan dan pertanggungjawaban belanja;
 - h. melaksanakan akuntansi dinas komunikasi dan informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. menyusun laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran dan laporan keuangan akhir tahun; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
2. Subbagian kepegawaian dan Umum, mempunyai tugas:
- a. a. menyusun rencana kebutuhan, pengamanan, pemanfaatan, penatausahaan dan barang milik dinas komunikasi dan informatika;
 - b. melakukan koordinasi pelaksanaan pengadaan, penyimpanan dan pemeliharaan sarana, prasarana, perlengkapan dan operasional lainnya.
 - c. melakukan koordinasi berkaitan dengan penggunaan, peminjaman dan pengembalian sarana prasarana perlengkapan oleh satuan kerja dan lembaga/pihak lain;
 - d. melakukan rekonsiliasi dan laporan barang milik daerah pada dinas komunikasi dan informatika;
 - e. menyiapkan upaya peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai;
 - f. mengelola urusan pelayanan administrasi umum dan tata usaha surat menyurat, kearsipan serta dokumentasi;



- g. melakukan pendataan, pengolahan administrasi kepegawaian, urusan kepegawaian dan hak-hak kepegawaian pada dinas komunikasi dan informatika;
 - h. menyiapkan koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian;
 - i. melaksanakan penertiban administrasi urusan umum dan kepegawaian;
 - k. membuat daftar urut kepangkatan (DUK), menyusun daftar penjaminan kenaikan pangkat pegawai, penjaminan kenaikan gaji berkala, penjaminan cuti, presensi pegawai dan menyusun daftar kebutuhan pegawai serta memproses cuti pegawai;
 - l. menyiapkan laporan evaluasi dan penilaian kinerja pegawai;
 - m. menyiapkan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan bidang umum, kepegawaian dan perlengkapan; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan fungsi.
2. Bidang informasi dan komunikasi publik dipimpin oleh kepala bidang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, merencanakan, membina, mengendalikan, mengawasi, monitoring, mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan bidang informasi dan komunikasi publik. Dalam melaksanakan tugas, kepala bidang informasi dan komunikasi publik menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;

- b. pelaksanaan monitoring opini dan aspirasi publik;
 - c. pelaksanaan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah;
 - d. pelaksanaan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
 - e. pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik;
 - f. pelaksanaan pelayanan informasi publik;
 - g. pelaksanaan layanan hubungan media;
 - h. kemitraan dengan pemangku kepentingan;
 - i. pelaksanaan manajemen komunikasi krisis;
 - j. pelaksanaan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
 - k. pelaksanaan penguatan tata kelola komisi informasi di daerah;
 - l. penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas;
 - m. penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah;
 - n. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan bidang informasi dan komunikasi publik; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya
3. Bidang layanan tata kelola aplikasi informatika dipimpin oleh kepala bidang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, merencanakan, membina, mengendalikan, mengawasi, monitoring, mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan bidang layanan tata kelola aplikasi informatika.



Dalam melaksanakan tugas kepala bidang layanan tata kelola aplikasi informatika, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang layanan tata kelola aplikasi informatika;
- b. pelaksanaan pendaftaran nama domain pemerintah daerah;
- c. pelaksanaan penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
- d. penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah;
- e. penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- f. sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
- g. penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah;
- h. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi;
- i. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik;
- j. pengelolaan pusat data pemerintah daerah;
- k. pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
- l. penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah;
- m. pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten cerdas dan kota cerdas;
- n. pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah;
- o. pengelolaan government chief information officer (GCIO);
- p. monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE;

- q. penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah;
 - r. pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah;
 - s. pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah berbasis elektronik dan non elektronik;
 - t. penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah;
 - u. penetapan pola hubungan sandi komunikasi sandi antar perangkat daerah;
 - v. operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah;
 - w. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan bidang layanan tata kelola aplikasi informatika; dan
 - x. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang data dan statistik sektoral, dipimpin oleh kepala bidang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, merencanakan, membina, mengendalikan, mengawasi, monitoring, mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan bidang data dan statistik sektoral.
- Dalam melaksanakan tugas kepala bidang data dan statistik sektoral, menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang data dan statistik sektoral;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral;
 - c. peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi;

- d. membangun metadata statistik sektoral;
 - e. peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
 - f. pengembangan infrastruktur;
 - g. penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di daerah;
 - h. pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan bidang data dan statistik sektoral; dan
 - i. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai keahlian dan kebutuhan.
- Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat saat ini berkedudukan dan menempati kantor dengan alamat Jl. Serenaru Kelurahan Wae Kelambu Kec. Komodo Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, telephone Telp/Fax. (0385) 32440.

Jumlah sumber daya manusia di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat dari segi kuantitas maupun kualitas masih perlu ditingkatkan, mengingat tugas-tugas dimasa mendatang akan lebih berat, terutama dalam rangka menjalankan tugas pokok sebagai koordinator, pelaksana kebijakan baik dari pusat maupun provinsi.

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 35 orang, yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) orang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan 15 (lima belas) orang Pegawai Kontrak Daerah.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari tingkat pendidikan, adalah:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| a. Pendidikan S2 | : - orang (0%) |
| b. Pendidikan S1 | : 17 orang (74%) |
| c. Pendidikan D3/Sarjana Muda | : 2 orang (9%) |
| d. SMA | : 3 orang (13%) |
| a. SLTP | : 1 orang (4%) |

Jumlah Pegawai Kontrak Daerah ditinjau dari tingkat pendidikan, adalah:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| a. Pendidikan S1 | : 11 orang (73%) |
| b. Pendidikan D3/Sarjana Muda | : 1 orang (7%) |
| c. SMA | : 3 orang (20%) |



Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	TINGKAT PENDIDIKAN	KONTRAK	PNS	Jumlah
1.	S2	-	-	-
2.	S1	11	17	28
3.	D III	2	1	3
4.	SMA	3	3	6
5.	SLTP	-	1	1
Jumlah Total		16	22	38

Sumber: Dinkominfo Mabar 2021

Data PNS dan CPNS menurut Pangkat/Golongan adalah sebagai berikut:

- Golongan IV/c : - orang
- Golongan IV/b : 2 orang
- Golongan IV/a : 3 orang
- Golongan III/d : 8 orang
- Golongan III/c : 1 orang
- Golongan III/b : 2 orang
- Golongan III/a : 3 orang
- Golongan II/d : 1 orang
- Golongan II/c : 1 orang
- Golongan II/b : 1 orang
- Golongan II/a : 1 orang
- Golongan I/d : - orang

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	UNIT KERJA	CPNS			PNS				Jumlah
		I	II	III	I	II	III	IV	
1.	Dinkominfo	-	-	-	-	3	13	5	21
2.	UPTD RSPD	-	-	-	-	1	1	-	2
Jumlah Total		-	-	-	-	4	14	5	23

Sumber: Dinkominfo Mabar 2021

Berdasarkan tinjauan diatas, dapat diketahui profil pendidikan pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat. Tingkat pendidikan paling tinggi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika adalah S1 dengan jumlah pegawai 28 orang. Sedangkan yang palig rendah adalah lulusan SLTP sejumlah 1 orang. Dari jumlah lulusan, paling tinggi adalah S1 sebanyak 28 orang.

Sedangkan bila ditinjau dari aspek aset untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, fasilitas yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Daftar Sarana - Prasarana
Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Jenis Aset	Jumlah	Satuan
1	2	3	4
1	Gedung Kantor Kominfo	1	Unit
2	Gedung RSPD	2	Unit
3	Kendaraan Roda 4	2	Unit
4	kendaraan Roda 2	10	Unit
5	Rak kayu	1	Unit
	Rak server single door	1	unit
6	Filing besi	1	Unit
7	Lemari kayu	11	Unit
8	Meja	14	Unit
	Meja kayu tripleks di gedung KIM	1	Unit
	Meja panjang tripleks/sekat	14	Sekat
9	Genset	1	Unit
10	Kursi	48	Unit
	Kursi pejabat eselon	2	Unit
	Kursi di gedung KIM	15	Unit
11	Sofa	2	Unit
12	Mesin potong rumput	1	Unit



No	Jenis Aset	Jumlah	Satuan
1	2	3	4
13	AC	7	Unit
	TV	2	Unit
	TV di gedung KIM	1	Unit
14	Komputer PC	7	Unit
	Komputer PC gedung KIM	14	Unit
	Laptop	12	Unit
15	Printer	13	Unit
	Internet	10	Unit
16	Scaner	1	Unit
	Ups	1	Unit
17	Server	14	Unit
18	Router	11	Unit
19	Hub	2	Unit
	Switch hub	1	Unit
20	Modem di gedung	1	Unit
21	Peralatan jaringan	23	Unit
22	Wireles access point	41	Unit
23	Camera	4	Unit
24	Proyektor	1	Unit
25	Amplifer	1	Unit
	Loudspeaker	2	Unit
	Microphone	4	Unit
26	Equalizer	1	Unit
27	Headphone	2	Unit
	Handycame	2	Unit
28	Faximile	1	Unit
29	Transceifer FM	1	Unit
30	Alat komunikasi radio	2	Unit
	Alat komunikasi sosial	2	Unit
31	Alat pemancar FM	7	Unit
32	Bak fiber	1	Unit

Sumber: Dinkominfo Mabar 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Tupoksi

Era keterbukaan yang lebih mengedepankan aspek transparansi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas, *Good Government* tata pemerintahan yang baik, merupakan issue pokok yang menjadi pusat perhatian semua institusi untuk berupaya menjadikannya sebagai sasaran capaian dalam meningkatkan kinerja organisasi. Di samping itu semakin ketatnya persaingan global, menuntut setiap institusi untuk dapat menerapkan prinsip *Good Government* sebagai prasyarat agar tetap mampu berkiprah sejajar dengan kompetitor yang tidak hanya dalam lingkup lokal, tetapi sampai dalam lingkup global.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah memberikan bukti mampu menciptakan media yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dalam mentransformasikan informasi dari dan ke berbagai penjuru dunia, sangat menjanjikan bagi institusi sebagai salah satu solusi dalam mewujudkan *good governance*.



Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat melakukan upaya untuk memfasilitasi terwujudnya *good governance* melalui *electronic government (e – government)*, pengurangan terjadinya kesenjangan informasi, penyebarluasan informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di bidang TIK, serta melakukan pengendalian jasa Pos dan Telekomunikasi. Sebagai pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, tertuang dalam Renstra 2016-2021, target SPM, IKK dan MDG's sbb:

Tabel 2.4**Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke -						Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke -						Rasio Capaian Pada Tahun ke-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Menyediakan sistem data dan statistik yang terintegrasi, Buku Kabupaten Manggarai Barat dalam angka dan Buku PDRB	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi, Buku Kabupaten Manggarai Barat dalam angka dan Buku PDRB	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	TA	Ada	100	100	100	100	-	100
			Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	TA	Ada	100	100	100	100	-	100
			Buku PDRB	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	TA	Ada	100	100	100	100	-	100
2	Mewujudkan Perangkat Daerah yang menggunakan	Terwujudnya Perangkat Daerah yang menggunakan	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Sandi dalam Komunikasi	0	3	7	17	27	37	0	0	1	1	1	1	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33



	an sistem persandian	kan sistem persandian																			
3	Menyediakan akses Komunikasi dan Informasi serta Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) tingkat Kecamatan	Tersedianya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) tingkat Kecamatan	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM ditingkat Kecamatan	6	11	21	31	41	51	0	5	10	15	15	15	0	45.45	47.62	48.39	36.59	29.41
		Tersedianya akses Komunikasi dan Informasi	Persentase Desa/Kelurahan yang Terakses Telekomunikasi	43.24	53.24	70	80	90	100	20	34	75	80	90	100	46.25	63.86	107.14	100	100	100
			Persentase Desa/Kelurahan yang Bisa diakses RSPD	42.60	50.30	59.17	73.96	88.76	100	50	67	75	71	88,76	100	117.37	133.2	126.75	95.99	100	100
			Persentase OPD yang Menerapkan e-Government	12.5	40.91	50	61.36	79.55	79.55	15	40.91	50.00	60	80	80	120	100	100	97.78	100.57	100.57
			Persentasi Wilayah Kecamatan Terlayani Akses Internet	20	36.65	53.33	70.00	86.67	100	20	35	50	77	90	100	100	95.5	93.76	110	103.84	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika 2021



Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika pada level program, selanjutnya, kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika akan di analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel 2.6.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Manggarai Barat 2016-2021

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Langsung	3.041.157.511	2.388.264.000	3.290.011.200	2.975.756.500	2.846.053.610	2.909.642.047	2.327.584.735	3.228.349.075	2.912.904.512	2.650.912.836	95.68	97.46	94.15	97.89	93.14		
Belanja Tidak Langsung	2.850.052.004	0	1.552.378.784	1.607.698.116	1.635.364.957	2.832.123.441	0	1.461.614.811	1.595.919.651	1.556.815.508	99.37	--	98.13	99.27	95.20		

Catatan :

Th. 2016 masih bergabung sebagai Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi

Th. 2017 Belanja Tidak Langsung masih dianggarkan di Dinas Perhubungan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat dalam pengembangan pelayanan, adalah sebagai berikut:

- a. Perkembangan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi sangat cepat
- b. Dalam menunjang Pariwisata sebagai *leading sector*, Dinas Komunikasi dan Informatika harus mampu menyiapkan informasi yang terpusat dan mudah dijangkau bagi wisatawan yang datang maupun bagi masyarakat Manggarai Barat itu sendiri. Mengingat semakin meningkatkannya kunjungan wisatawan di Manggarai Barat apalagi Manggarai Barat telah ditetapkan sebagai daerah otorita pariwisata nasional oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian tuntutan akan kebutuhan pelayanan publik dan pelayanan administrasi berbasis TIK terus berkembang semakin cepat
- c. Menjadi tantangan bagi Pemda untuk lebih meningkatkan kemudahan akses informasi pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat.
- d. Jangkauan siaran Radio Pemerintah Daerah yang belum sampai pada wilayah pelosok maupun wilayah pulau, pengelolaan siaran radio Pemerintah Daerah yang belum maksimal, pembinaan terhadap Kelompok Informasi Masyarakat belum maksimal dll. hal ini sangat mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
- e. Tuntutan masyarakat terhadap terwujudnya *good governance* dan pelayanan prima, memacu Dinas Komunikasi dan Informatika

untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanannya terutama menerapkan *e-Government*.

- f. Sumber daya aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika yang belum memadai karena belum adanya tenaga teknis yang benar-benar mendalami pendidikan formal tentang teknologi informasi dan komunikasi.
- g. Anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana bidang Komunikasi dan Informasi dalam menunjang kegiatan pelayanan bagi masyarakat masih relatif rendah dan belum memadai. Hal ini disebabkan karena masih adanya asumsi bahwa pembangunan dibidang Komunikasi dan Informatika tidak secara langsung memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD. Padahal fungsi utama bidang Komunikasi dan Informatika lebih diutamakan dalam memberikan pelayanan informasi pembangunan bagi masyarakat serta sebagai Leading Sector di bidang Pembangunan TIK dalam rangka mewujudkan E-Government dan Manggarai Barat Smart City.
- h. Adanya potensi pendapatan dibidang Komunikasi dan Informatika yang masih belum terjamah. Sehingga perlu dilakukan kajian ulang yang menyeluruh terhadap sumber-sumber PAD tersebut untuk dibuatkan landasan hukumnya.
- i. Ketersediaan SDM masih sangat terbatas.

2.4.2 Peluang

Peluang Pengembangan Pelayanan yaitu:

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai instansi vital yang memainkan peranan penting dalam Misi ke-5 Bupati Manggarai Barat untuk lima tahun ke depannya.
- b. Adanya konsep smart city sebagai kebijakan pemerintah pusat

- c. Dengan telah ditetapkan Labuan Bajo sebagai bagian dari 5 (lima) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas/ Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), maka ini adalah peluang bagi Pemda Kabupaten Manggarai Barat untuk mengusulkan anggaran kepada Pemerintah Pusat untuk pengembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi di Kab. Manggarai Barat.
- d. Pembuatan dan pengembangan standar pelayanan minimal (SPM) Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai SOP yang ada.
- e. Melaksanakan aturan yang ada termasuk pemberian fasilitas kepada masyarakat pengusaha dibidang Komunikasi dan Informasi, seperti Pembangunan Menara Telekomunikasi, usaha internet, Usaha/Kounter telepon seluler dll.
- f. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai aturan-aturan yang ada.
- g. Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika. Serta pengajuan permohonan untuk formasi tenaga teknis dibidang Komunikasi dan Informasi kepada Badan Kepegawaian Daerah.
- h. Menginventarisasi dan menindak lanjuti potensi-potensi PAD yang selama ini belum tersentuh.
- i. Pengawasan internal yang melekat dan berjenjang di Dinas Komunikasi dan Informatika.
- j. Mengefektifkan tenaga-tenaga Dinas Komunikasi dan Informatika yang ada.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini akan dijelaskan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika berikut ini.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berkembangnya era digital, menjadi tantangan baru dari setiap urusan pembangunan. Komunikasi dan informatika merupakan salah satu urusan yang memiliki tantangan terhadap kemajuan era digital. Setiap urusan dituntut untuk mengembangkan ke arah digitalisasi, termasuk dalam sistem pemerintahan. Kabupaten Manggarai Barat masih memiliki kapasitas yang rendah dalam mengembangkan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE). Permasalahan pokok tersebut disebabkan karena masih belum optimalnya dalam penyelenggaraan E-government dan juga tergolong masih rendahnya masyarakat publik dalam mengakses informasi. Penjabaran dari kedua permasalahan tersebut tersajikan pada pemetaan masalah sebagai berikut.

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Urusan Komunikasi dan Informatika

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE)	Belum optimalnya penyelenggaraan E-government	Minimnya sarana prasarana pendukung penerapan SPBE
		Rendahnya tata kelola dan layanan SPBE
		Belum memadainya kapasitas SDM bidang IT
		Minimnya regulasi yang mengatur tata kelola dan layanan SPBE
		Masih rendahnya penyelenggaraan keamanan informasi
		Minimnya perangkat daerah yang menggunakan persandian dalam komunikasi
	Masih rendahnya akses informasi publik	Belum optimalnya pemberdayaan dan peran aktif masyarakat / KIM dalam penyebarluasan informasi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Kelembagaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pembantu belum optimal
		Minimnya prasarana penunjang layanan RSPD
		Rendahnya kualitas dan kuantitas konten siaran RSPD
		Rendahnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelayanan publik
		Masih adanya wilayah yang belum terjangkau telekomunikasi
		Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan statistik sektoral

Urusan statistik erat kaitannya dengan penggunaan dan pemanfaatan data sektoral dalam penyelenggaraan pembangunan. Permasalahan urusan statistik di Kabupaten Manggarai Barat secara umum yaitu masih rendahnya penggunaan data statistik sektoral untuk penyelenggaraan pembangunan yang diakibatkan oleh data statistik yang belum tersedia secara terintegrasi.

Tabel 3.2. Pemetaan Permasalahan Urusan Statistik

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Minimnya pemanfaatan data statistik sektoral dalam penyelenggaraan pembangunan	Belum optimalnya ketersediaan data dan statistik sektoral yang terintegrasi	Rendahnya kepatuhan OPD dalam penyediaan data statistik sektoral
		Belum adanya regulasi terkait tata kelola statistik sektoral
		Belum optimalnya sinkronisasi dan koordinasi data

Urusan persandian di Kabupaten Manggarai Barat secara umum masih belum optimal akibat rendahnya pemahaman terkait manfaat persandian untuk keamanan informasi serta minimnya penggunaan persandian dalam pelaksanaan pemerintahan.

Tabel 3.3. Pemetaan Permasalahan Urusan Persandian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya jaminan keamanan data dan informasi	Belum optimalnya layanan persandian	Rendahnya pemahaman aparatur di bidang persandian untuk keamanan informasi
		Belum adanya regulasi terkait tata kelola keamanan informasi
		Rendahnya Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian
		Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung persandian

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi mencerminkan kondisi yang akan dicapai di akhir periode perencanaan, sedangkan misi merupakan rumusan umum sebagai upaya untuk mencapai visi. Visi dan misi diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang merujuk kepada RPJPD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2005-2025 dan mempertimbangkan pemetaan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang berkembang dan menentukan arah pembangunan.

Visi

Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026 disusun berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang kemudian dielaborasi dengan kebutuhan dan isu strategis pembangunan daerah yang harus direspon. Rumusan visi dan misi didasarkan pula pada RPJPD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2005-2025, yang pada periode terakhir pembangunan jangka panjang ini memiliki tema pembangunan berupa “Pengelolaan Pertumbuhan Ekonomi, Dunia Pariwisata, Penciptaan Lapangan Kerja dan Pendapatan, Mobilisasi Investasi dan Kerjasama antar Daerah”.

Berangkat dari berbagai dasar tersebut, visi RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026, yaitu:

Visi:

“MABAR BANGKIT MENUJU MABAR MANTAP”.

Makna dari Visi ini dijabarkan sebagai berikut :

1. Mabar Bangkit, bagi masyarakat Indonesia, istilah atau kata “Bangkit” mengandung makna filosofis dan historis yang mendalam. Ketika Bangsa Indonesia berjuang melawan penindasan dan penjajahan, para pahlawan sepakat untuk bersatu dan bangkit melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan. Dalam Konteks Visi tersebut, kata “Bangkit” dimaknai sebagai berikut:

- **Bangkit** merupakan seruan dan ajakan untuk membangun kebulatan tekad bersama masyarakat Manggarai Barat untuk *“bangun dari tidurnya”* dan berjuang bersama melawan berbagai masalah dan ketertinggalan yakni kemiskinan, ketertinggalan dalam kualitas pendidikan, ketertinggalan dalam jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dasar, ketertinggalan dalam pembangunan berbagai infrastruktur dasar serta ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi pertanian.
- **Bangkit** juga dimaknai sebagai suatu tindakan aktif untuk bergegas dari situasi yang ada menuju situasi baru yang lebih baik. Bangkit juga sebuah ajakan bersama yang diharapkan akan menggugah semangat seluruh komponen masyarakat Manggarai Barat untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki dengan **semangat restorasi**. Semangat restorasi diharapkan membawa kerja keras seluruh komponen untuk mengejar ketertinggalan Kabupaten Manggarai Barat dalam berbagai dimensi pembangunan.

2. MANTAP merupakan singkatan dari Maju, Unggul, Tangguh dan Populer.

- **Mabar Mantap** mengandung pengertian sebuah sikap hati/keyakinan bersama dan optimisme untuk menjadikan Kabupaten Manggarai Barat sebagai daerah yang Maju, Unggul, Tangguh, dan Populer. Pembangunan daerah difokuskan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat dengan terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar serta tersedianya sarana dan prasarana dasar yang merata, berkualitas dan memadai.
- **Mabar Mantap** juga bermakna terwujudnya kualitas SDM yang produktif, mandiri, dinamis, kreatif dan inovatif, jujur, beretika dan berintegritas, sehingga mampu bersaing secara kompetitif dan komparatif di berbagai bidang kehidupan. Melalui Mabar Mantap, prioritas pembangunan akan diarahkan berdasarkan potensi daerah setempat melalui pemberdayaan masyarakat dengan menghubungkan berbagai aspek pembangunan sehingga mampu mandiri dan menghasilkan produksi yang bernilai ekonomis dan mampu bersaing untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pada sektor pariwisata dan pertanian.
- **Mabar Mantap** juga memberi arti bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan sepenuhnya berpihak pada seluruh lapisan masyarakat Manggarai Barat.

3. Mabar Bangkit menuju Mabar Mantap menunjukkan tekad, semangat dan optimisme bersama seluruh masyarakat Manggarai Barat menuju perubahan ke arah yang lebih baik dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki daerah guna mewujudkan perbaikan-perbaikan dalam setiap dimensi

pembangunan untuk **Masyarakat Manggarai Barat Yang Maju, Unggul, Tangguh Dan Populer.**

Misi

Misi RPJMD merupakan rumusan yang menjadi representasi dari seluruh aspek pembangunan yang akan dijalankan untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Manggarai Barat. Rumusan Misi RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026 sebagai berikut:

Misi 1: Mengembangkan Pariwisata secara Berkelanjutan dan Inklusif sebagai Penggerak Utama Ekonomi

Kabupaten Manggarai Barat memiliki karakteristik pariwisata yang unik dan memiliki keunggulan komparatif. Karakteristik tersebut ditopang dengan perhatian pemerintah pusat yang besar bagi pembangunan pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat. Pembangunan pariwisata Manggarai Barat perlu dikerangkai dalam konsep pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Pembangunan pariwisata yang inklusif tidak hanya digerakkan dan menggerakkan sektor pariwisata sendiri, melainkan juga menjadi lokomotif utama atau pemicu (*trigger*) bagi pembangunan sektor ekonomi lainnya. Pembangunan pariwisata yang inklusif digerakkan oleh lintas sektor dan sinergi berbagai pemangku kepentingan. Berpijak dari pembangunan yang inklusif, pembangunan pariwisata berkelanjutan juga dapat dijalankan, yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan perekonomian daerah, sekaligus mampu diterima dan diwarnai oleh budaya lokal dan membawa kesejahteraan masyarakat, serta tidak kalah penting tetap membawa manfaat bagi kelestarian lingkungan.

Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Misi ini diarahkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang. Misi ini juga diarahkan untuk mempermudah keterjangkauan masyarakat *dalam* mendapatkan pelayanan dasar yang tanggap, cepat dan layak sehingga mampu memberikan jaminan berupa kesejahteraan dan rasa aman. Selain itu, Misi 2 juga menjadi upaya untuk menjalankan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, sehingga tidak terdapat ketimpangan akses bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan.

Misi 3: Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal

Potensi ekonomi Manggarai Barat yang melimpah, antara lain berupa pertanian, peternakan, dan perikanan perlu dioptimalkan untuk membangun daya saing daerah. Pembangunan daya saing yang berbasis potensi *lokal* diharapkan semakin memperkuat struktur perekonomian daerah dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Perekonomian daerah yang kokoh juga ditopang oleh pelaku UMKM yang mampu menjaga eksistensi dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Selain itu, Manggarai Barat sebagai prioritas pembangunan nasional, terutama di bidang pariwisata, perlu direspon dengan membangun iklim investasi yang kondusif. Peningkatan investasi tetap diarahkan agar mampu menyerap tenaga kerja lokal, sehingga gerak perekonomian Manggarai Barat yang semakin meningkat, beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Misi 4: Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Kelestarian Lingkungan

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas perekonomian, serta membuka aksesibilitas daerah-daerah perbatasan, pinggiran dan terisolir. Pembangunan infrastruktur dalam Misi 4 juga terkait peningkatan kelayakhunian, yang sekaligus memiliki sasaran khusus untuk ikut menjalankan upaya pengentasan kemiskinan melalui penyediaan rumah layak huni. Tidak kalah penting, Misi 4 juga mengarahkan derap pembangunan infrastruktur yang menopang aktivitas perekonomian tetap mampu menjaga kesesuaian dengan kebijakan tata ruang wilayah, menjaga daya dukung dan daya dukung lingkungan hidup, serta meningkatkan ketangguhan terhadap bencana.

Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan Melayani

Kebijakan utama dalam menjalankan Misi 5 adalah penerapan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Penerapan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur, transparan dan akuntabel, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran, sistem kerja yang jelas dan terukur, kebijakan penganggaran yang efisien, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Tata kelola pemerintahan di dalam Misi 5 juga terkait implementasi prinsip partisipasi publik dalam pembangunan yang semakin meningkat melalui penyelenggaraan

pemerintahan yang terbuka. Efektivitas pembangunan daerah juga ditopang dengan peningkatan keberdayaan desa. Oleh karena itu, Misi 5 juga memiliki prioritas untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan optimalisasi *pembangunan* desa melalui kelembagaan masyarakat desa yang kuat dalam mengelola potensi lokal desa.

Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2021 - 2026, maka Dinas Komunikasi dan Informatika akan melaksanakan misi ke 5 (lima) sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat.

Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut dalam tabel 3.2

Tabel 3.4

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Mabar Bangkit Menunju Mabar Mantap				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan Melayani			
	Program Aplikasi Informatika	Masih kurangnya layanan publik dan pemerintah yang terintegrasi	jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK	Kewenangan dalam menangani TIK
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Rendahnya keterbukaan informasi publik	Rendahnya peran aktif stakeholder dan PPID pembantu	Regulasi tentang pengelolaan PPID
	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Kurangnya kesadaran akan pentingnya data statistic sectoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Belum adanya Big data dan Prasarana Data center	Kewenangan dalam menangani TIK
	Program penelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Rendahnya layanan pengamanan informasi daerah	Belum tersedianya perangkat pendukung pelayanan keamanan informasi	regulasi tentang pengamanan informasi daerah
	Program pwnunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	- Belum tersedianya gedung kantor Dinas Komunikasi dan	Ketersediaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika yang mencukupi untuk	Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan instansi Dinas Komunikasi dan Informatika

		<p>Informatika yang memadai untuk pelayanan kepada Publik</p> <ul style="list-style-type: none">- Kurangnya aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika mengikuti pelatihan tentang pengelolaan kelembagaan atau organisasi pemerintahan- Ketersediaan sarana dan prasarana perlengkapan kerja aparatur yang masih kurang	<p>membiayai program dan kegiatan rutin Sekretariat</p>	<p>Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat</p>
--	--	--	---	---

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi

Dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 yang terkait dengan bidang komunikasi dan informatika perlu mempertimbangkan terjadinya permasalahan, faktor pendorong dan penghambat, yaitu pergeseran paradigma yang terjadi dalam teknologi informasi dan komunikasi, serta media yang berimbas pada model bisnis dan juga regulasi serta kebijakan yang terkait. Beberapa pergeseran yang perlu dicermati dan dipertimbangkan dalam penyusunan Renstra 2021-2026 Bidang Komunikasi dan informatika baik di tingkat Kementrian, provinsi dan Kabupaten.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Komunikasi

dan Informatika yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada table 3.5.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Sasaran Renstra Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur di NTT	Masing-masing Perangkat Daerah membangun dan mengembangkan aplikasi dan jaringan TIK termasuk internet hal ini disebabkan karena ego sektoral dari masing-masing Perangkat Daerah yang membangun secara parsial	Belum terbangun kesepahaman dalam proses pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur (jaringan internet)	Telah dikeluarkan peraturan Gubernur NTT Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Pengembangan E-Government Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Adanya Perpres RI Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Siste Pemerintahan Berbasis Elektronik
2	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Ketersediaan SDM Bidang TIK sesuai dengan kebutuhan (Programer, Analisa Sistem, Desain Grafis) di Lingkup Pemprov NTT belum tersedia sesuai kebutuhan	Pola rekrutmen yang belum menjawab kebutuhan Pelaksanaan Bimtek yang belum mengakomodir kebutuhan	Telah adanya Rencana Induk Pengembangan E-Government (SPBE) di dalamnya termasuk rencana kebutuhan dan pengembangan SDM bidang TIK
3	Menciptakan birokrasi yang professional dengan karakteristik yang adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi,	Dalam konteks SPBE Provinsi NTT berada pada peringkat terendah ke 33 se-Indonesia Kegiatan pelayanan	Pembangunan SPBE masih bersifat parsial Belum terbentuk komitmen Bersama untuk percepatan	Adanya Perpres RI Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Siste Pemerintahan Berbasis Elektronik Adanya Komitmen Gubernur NTT

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	bebas dan bersih KKN (indikator RPJMD : indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE)	pemerintahan baik kepada public maupun layanan administrasi pemerintahan Sebagian besar masih bersifat manual	pembangunan dan pengembangan SPBE Maasih terdapat wilayah Blank Spot persebaran layanan jaringan internet	Adanya RPJMD yang memuat SPBE Adanya Pergub Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Pengembangan E-Government Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Adanya Renduk SPBE

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan pembangunan yang termuat di dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026 diarahkan selaras dengan kebijakan penataan ruang, baik dalam rangka mengoptimalkan kawasan peruntukan budidaya untuk pengembangan potensi dan akselerasi pembangunan ekonomi daerah, maupun menjaga kawasan lindung. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Manggarai Barat untuk mewujudkan ruang daerah yang produktif dan berwawasan lingkungan sebagai pusat distribusi barang dan jasa sesuai ruang peruntukan. Adapun kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Manggarai Barat terdiri dari:

1. Pemantapan sistem perkotaan yang mendukung kegiatan pariwisata, pertanian dan kelautan untuk peningkatan pelayanan wisata dan peningkatan komoditi pertanian serta potensi kelautan unggulan;
2. Pendistribusian persebaran penduduk sesuai dengan kebijakan pusat-pusat pelayanan;
3. Pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhirarki dan bersinergis antara pusat pengembangan utama di ibukota kabupaten dan perkotaan lainnya serta pengembangan sistem permukiman yang mendukung pelayanan wisata serta

peningkatan komoditi pertanian dan potensi kelautan unggulan;

4. Pengelolaan sistem transportasi yang terpadu untuk membantu kelancaran bagi masyarakat untuk melakukan pergerakan interaksi fungsional antar pusat kegiatan satu dengan yang lainnya;
5. Penyediaan fasilitas pelayanan bagi rumah-rumah masyarakat;
6. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sumberdaya alam/buatan dan ekosistemnya, meminimalkan resiko dan mengurangi kerentanan bencana, mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip partisipasi, menghargai kearifan lokal, serta menunjang pariwisata, penelitian, dan edukasi;
7. Pengembangan kawasan budidaya meliputi pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan kawasan pariwisata, agropolitan, dan minapolitan;
8. Pengaturan zona pemanfaatan dan zona konservasi pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, guna mencegah terjadinya konflik kepentingan, serta pengaturan mekanisme penegakan hukum yang mengikutsertakan masyarakat;
9. Mengembangkan kawasan pariwisata, agropolitan, minapolitan dan kawasan perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup, sebagai kawasan strategis kabupaten;
10. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika ditinjau dari implikasi RTRW dan disajikan dalam tabel 3.6.

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemantapan sistem perkotaan yang mendukung kegiatan pariwisata, pertanian dan kelautan untuk peningkatan pelayanan wisata dan peningkatan komoditi pertanian serta potensi kelautan unggulan;	<ul style="list-style-type: none">• Kewenangan dalam menangani TIK, informatika (telematika) dalam mewujudkan kota cerdas• Distribusi Sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK yang masih kurang• Kurangnya infrastruktur TIK jaringan	<ul style="list-style-type: none">• Lembaga yang bergerak di bidang TIK• Gerakan Menuju 100 Smart City• Pengembangan Infrastruktur TIK dan Jaringan
2	Mengembangkan kawasan pariwisata, agropolitan, minapolitan dan kawasan perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup, sebagai kawasan strategis kabupaten;	<ul style="list-style-type: none">• Kewenangan dalam menangani TIK, informatika (telematika),• Distribusi Sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK yang masih kurang• Kurangnya infrastruktur TIK dan Jaringan	<ul style="list-style-type: none">• Lembaga yang bergerak di bidang TIK• Gerakan Menuju 100 Smart City• Pengembangan Infrastruktur TIK dan Jaringan

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat; visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika; dan identifikasi masalah tersebut

diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan SDM Aparatur Bidang Komunikasi dan Teknologi Informasi
2. Meningkatkan Sarana Prasarana Bidang Komunikasi dan Informatika
3. Meningkatkan Kerjasama Masyarakat, Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan TIK
4. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Informasi Kepada Masyarakat melalui Berbagai Media;
5. Meningkatkan kualitas Pengelola Informasi Daerah demi terciptanya keterbukaan informasi public yang berkualitas.
6. Mengoptimalkan Penerapan E-Government di Kabupaten Manggarai Barat
7. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
8. Kabupaten Manggarai Barat sebagai daerah tujuan pariwisata internasional memiliki kewajiban menyelenggarakan pelayanan publik yang mudah dan dapat terjangkau. Agar pelayanan publik dapat diberikan dengan efektif dan efisien, maka dukungan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) sangat dibutuhkan. Dukungan tersebut tidak hanya terbatas sampai pada *front office* saja, namun juga dibutuhkan integrasi pada sistem *back office* nya sehingga didapatkan rumusan isu strategis yaitu *terintegrasinya berbagai sistem pelayanan baik untuk masyarakat maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan.*
9. Pengembangan sistem pelayanan publik yang terintegrasi tentunya membutuhkan dukungan infrastruktur yang tidak sedikit. Perkembangan teknologi yang sedemikian pesat, juga harus diikuti dengan pengoptimalan infrastruktur yang ada, agar tidak membebani anggaran mengingat Kabupaten juga masih memiliki program-program prioritas yang harus dilaksanakan, seperti pendidikan dan kesehatan sehingga didapatkan rumusan

isu strategis yaitu *perlunya pengembangan Jaringan informatika dan Jaringan telekomunikasi untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berbasis TIK.*

10. Pengembangan sistem pelayanan publik yang terintegrasi dan didukung dengan infrastruktur yang memadai, tentunya tidak akan optimal tanpa adanya partisipasi dari masyarakat untuk memanfaatkan. Dalam pengembangan sistem pelayanan publiknya Pemerintah Daerah juga harus mempertimbangkan kemudahan pemanfaatannya agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat sehingga didapatkan rumusan isu strategis yaitu *Mengoptimalkan saluran komunikasi publik untuk mendorong masyarakat memanfaatkan layanan berbasis TIK yang telah disediakan.*
11. Kabupaten Manggarai Barat melalui mekanisme asesmen telah terpilih menjadi peserta Gerakan Menuju 100 Smart City" yang merupakan kegiatan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bentuk dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat hendaknya menjadi motivasi dalam menghadapi dan mengimplementasikan transformasi digital pada instansi pemerintah dalam skala yang luas dan menjangkau ke seluruh wilayah Kecamatan dan Desa serta ke berbagai sector.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki peran dan strategis dalam urusan komunikasi dan informatika; urusan statistik dan urusan persandian. dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Manggarai Barat yaitu “Mabar Bangkit menuju Mabar Mantap” sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2021-2026.

Sebagai penunjang pembangunan dalam jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tanggung jawab yang besar dalam Misi 5” Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, dan melayani” pada RPJMD 2021-2026, Tujuan RPJMD adalah : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan dinamis.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

Sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 – 2026 adalah “Terwujudnya birokrasi yang kapabel”.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026, dapat dilihat sebagai berikut;

Tabel 4.1

TUJUAN DAN SASARAN DISKOMINFO DALAM RANGKA PENCAPAIAN VISI DAN MISI RPJMD KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan dinamis	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.75	3.05	3.35	3.65	3.95

Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Diskominfo Kota Bandung yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 - 2026, dapat disimpulkan beberapa Indikator yang menjadi indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika seperti yang tergambar pada table berikut :

Tabel 4.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021 – 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
			2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks SPBE	Nilai	2,15	NA	2,75	3,05	3,35	3,65	3,95	3,95

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam bentuk upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Strategi dirumuskan dengan memperhatikan sasaran yang ingin dicapai, sedangkan arah kebijakan merupakan operasionalisasi dari masing-masing strategi. Selain itu, rumusan strategi dan arah kebijakan juga dirumuskan dengan memperhatikan rumusan masalah dan akar masalah dari setiap urusan yang sudah dijabarkan pada Bab IV

Untuk merumuskan strategi Perangkat Daerah dengan menggunakan analisis Logic Model atau Model Logika sebagaimana yang dirumuskan dalam strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026.

Logic model menyampaikan skema, program, atau proyek singkat, format yang visual. Logic model ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. Logic model adalah gambaran ringkas yang menjelaskan hubungan antara masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil serta kebutuhan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan yang terlibat dan terdampak.

Logic model membantu penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring, dan evaluasi pada level Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Model ini dapat diuji untuk kelayakan, dan lebih detailnya dapat menyelaraskan dengan kegiatan, sumber daya, output pada urusan teknis atau Perangkat Daerah.

Hubungan antara unsur-unsur terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat (kausal), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi pemerintah maupun pada Perangkat Daerah.



Strategi dan kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	4	5	6
Visi : Mabar Bangkit menuju Mabar Mantap Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, dan melayani				
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan dinamis	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Percepatan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Optimalisasi Aplikasi E-Government untuk pelayanan publik
			Penguatan Kelembagaan Keterbukaan Informasi Publik	Integrasi aplikasi E-Government untuk layanan internal Pemerintah Daerah
				Penguatan kapasitas PPID dan PPID Pembantu
				Penguatan ruang/media interaksi masyarakat dengan Pemerintah Daerah



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Manggarai Barat sesuai dengan pendanaan indikatif, maka ditetapkan kegiatan untuk belanja urusan wajib sebagai berikut :

1. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

1.1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1.1.1 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

1.1.2 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah

1.1.3 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

1.1.4 Pengelolaan Media Komunikasi Publik

1.1.5 Pelayanan Informasi Publik

1.1.6 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

1.1.7 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah

1.1.8 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

2. PROGRAM PENGELOAAN APLIKASI INFORMATIKA

2.1 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2.1.1 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota

2.1.2 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2.2 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



- 2.2.1 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2.2.2 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
- 2.2.3 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 2.2.4 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
- 2.2.5 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
- 2.2.6 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
- 2.2.7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

3. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

- 3.1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
 - 3.1.2 Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
 - 3.1.3 Membangun metadata Statistik Sektoral

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

- 4.1 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.1.1 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - 4.1.2 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



Adapun rencana program Dinas Komunikasi dan Informatika, dapat di lihat pada Tabel 6.1, Tabel 6.2 dan Tabel 6.3 di bawah ini;

Tabel 6.1

RENCANA PROGRAM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembanguna n Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan Melayani																
Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan dinamis	Indeks Reformasi Birokrasi	53,76	Nilai	65	4.104.689.693	68	4.704.574.046	71	4.828.531.401	74	7.223.563.377	77	13.034.727.143	77	33.896.085.658	Dinas Kominfo
Sasaran: Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.15	Indeks	2,75	4.104.689.693	3,05	4.704.574.046	3,35	4.828.531.401	3,65	7.223.563.377	3,95	13.034.727.143	3,95	33.896.085.658	
Program Layanan publik berbasis teknologi:																
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM)	0%	Persen	60%	805.219.880	70%	797.023.331	80%	729.076.845	90%	1.088.571.498	100%	1.965.786.753	100%	5.385.678.307	Dinas Kominfo



	Persentase OPD yang memiliki PPID pembantu aktif	3%	Persen	25%		50%		75%		85%		100%		100%		
	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	25%	Persen	40%		55%		70%		85%		100%		100%		
Program Layanan publik berbasis teknologi:																
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	25%	Persen	50%	3.121.309.103	60%	3.677.694.790	75%	3.856.428.941	85%	5.772.134.713	100%	10.413.678.139	100%	26.841.245.686	Dinas Kominfo
	Persentase layanan administrasi pemerintah yang terintegrasi	40%	Persen	50%		60%		75%		85%		100%		100%		
Program Layanan publik berbasis teknologi:																
Program Penyelenggaran Statistik Sektoral	Persentase PD yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan pembangunan	38%	Persen	45%	106.896.426	50%	137.913.555	60%	145.815.369	70%	217.714.300	80%	393.157.351	80%	1.001.496.999	Dinas Kominfo
Program Pembangunan Daerah:																
Program Penyelenggaran Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	10%	Persen	15%	71.264.284	20%	91.942.370	25%	97.210.246	30%	145.142.866	35%	262.104.900	35%	667.664.666	Dinas Kominfo



untuk Keamanan Informasi	Persentase aplikasi persandian yang diterapkan dalam SPBE	10%	Persen	20%		30%		40%		50%		60%		60%	
--------------------------------	---	-----	--------	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--

Tabel 6.2
Rekapitulasi Anggaran Rencana Program, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat

Kode Rekening	Program	Indikator Program	Kondisi Awal (2020)	Satuan	Capaian Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan Program Dan Kerangka Pendanaan										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
					TAHUN-1 2022		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
16,02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM)	N/A	%	60%	805.219.880	70%	797.023.331	80%	729.076.845	90%	1.088.571.498	100%	1.965.786.753	100%	5.385.678.307
16,03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	25%	%	50%	3.121.309.103	60%	3.677.694.790	75%	3.856.428.941	85%	5.772.134.713	100%	10.413.678.139	100%	26.841.245.686
		Persentase layanan administrasi pemerintah yang terintegrasi	40%	%	50%		60%		75%		85%		100%			
20,02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase PD yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan pembangunan	38%	%	45%	106.896.426	50%	137.913.555	60%	145.815.369	70%	217.714.300	80	393.157.351	80%	1.001.496.999
21,02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	N/A	%	10%	71.264.284	15%	91.942.370	20%	97.210.246	25%	145.142.866	30%	262.104.900	30%	667.664.666
		Persentase aplikasi persandian yang diterapkan dalam SPBE	10%	%	20%		30%		40%		50%		60%			



Tabel 6.3

Rekapitulasi Anggaran Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat

Kode					Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								2022		2023		2024		2025		2026			
1					2	3	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target	Target	Penganggaran	Target	Penganggaran	Target	Penganggaran	Target	Penganggaran	Target	Penganggaran		
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM)	N/A	60%	805.219.880	70%	797.023.331	80%	729.076.845	90%	1.088.571.498	100%	1.965.786.753	100%	5.385.678.307
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Terselenggaranya Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	805.219.880	100%	797.023.331	100%	729.076.845	100%	1.088.571.498	100%	1.965.786.753	100%	5.385.678.307
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil Monitoring Opini dan	4 dokumen	4 dokumen	86.499.000	4 dokumen	89.998.000	4 dokumen	63.436.000	4 dokumen	94.715.000	4 dokumen	171.040.000	4 dokumen	505.688.000



					Aspirasi Publik														
2	16	02	2.0 1	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi i Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 dokumen	2 dokumen	163.808.000	2 dokumen	170.203.600	2 dokumen	149.090.000	2 dokumen	189.750.000	2 dokumen	342.670.000	2 dokumen	1.015.521.600
2	16	02	2.0 1	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	N/A	-	-	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	175.000.000	1 dokumen	525.000.000
2	16	02	2.0 1	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 dokumen	1 dokumen	129.239.280	1 dokumen	66.761.731	1 dokumen	70.321.845	1 dokumen	113.251.498	1 dokumen	300.377.753	1 dokumen	679.952.107
2	16	02	2.0 1	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen hasil Pelayanan Informasi Publik	1 dokumen	10 dokumen	79.210.000	10 dokumen	102.204.000	10 dokumen	105.050.000	10 dokumen	161.342.000	10 dokumen	291.358.000	50 dokumen	739.164.000
2	16	02	2.0 1	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	N/A	5 Orang	96.463.600	4 Orang	125.271.000	3 Orang	95.880.000	6 Orang	137.223.000	15 Orang	250.387.000	32 Orang	705.224.600
2	16	02	2.0 1	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	N/A	-	-	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	42.000.000	1 dokumen	106.000.000	1 dokumen	208.000.000
2	16	02	2.0 1	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasi	1 dokumen	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	112.585.000	1 dokumen	115.299.000	1 dokumen	200.290.000	1 dokumen	328.954.000	1 dokumen	1.007.128.000



						kan Informasi Program atau Kebijakan													
2	16	03			PROGRAM PENGELOA AN APLIKASI INFORMAT IKA	Persentase pelayanan publik yang diselenggarak an secara online dan terintegrasi Persentase layanan administrasi pemerintah yang terintegrasi	25% 40%	50% 50%		60% 60%		75% 75%		85% 85%		100% 100%		100% 100%	
									3.121.309.10 3		3.677.694.790		3.856.428.941		5.772.134.713		10.413.678. 139		26.841.245.68 6
2	16	03	2.0 1		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Prosentase Domain dan Sub Domain dikelola dengan baik	100	-	-	100%	80.000.000	100%	90.000.000	100%	100.000.000	100%	130.000.00 0	100%	400.000.000
2	16	03	2.0 1	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten /Kota	Jumlah Pendaftaran nama domain pemerintah Kabupaten/Kota	1	-	-	169 domain	30.000.000	13 domain	35.000.000	10 domain	35.000.000	10 domain	45.000.000	202	145.000.000
2	16	03	2.0 1	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	N/A	-	-	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	65.000.000	1 dokumen	85.000.000	1 dokumen	255.000.000



2	16	03	.2. 02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	3.121.309.103	100%	3.597.694.790	100%	3.766.428.941	100%	5.672.134.713	100%	10.283.678.139,00	100%	26.441.245.686
2	16	03	2.0 2	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1.876.763.303	1 dokumen	2.053.973.790	1 dokumen	2.128.831.941	1 dokumen	3.151.978.713	1 dokumen	4.668.942.139	1 dokumen	13.880.489.886
2	16	03	2.0 2	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang dikelola	N/A	1	450.000.000	1	620.000.000	1	640.000.000	1	1.086.408.000	1	3.015.385.000	1	5.811.793.000
2	16	03	2.0 2	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	120.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	165.000.000	1 dokumen	185.000.000	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	970.000.000
2	16	03	2.0 2	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	N/A	5 Aplikasi	217.218.000	5 Aplikasi	220.246.000	5 Aplikasi	236.303.000	5 Aplikasi	292.405.000	5 Aplikasi	698.913.000	5 Aplikasi	1.665.085.000
2	16	03	2.0 2	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	N/A	1 layanan	193.049.000	1 layanan	253.884.000	1 layanan	267.024.000	1 layanan	452.583.000	1 layanan	751.373.000	5 layanan	1.917.913.000
2	16	03	2.0 2	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten	Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasi	N/A	1 dokumen	123.453.000	1 dokumen	149.274.000	2 dokumen	158.400.000	2 dokumen	251.435.000	2 dokumen	454.052.000	8 dokumen	1.136.614.000



					/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	kan sesuai dengan Master Plan Smart City													
2	16	03	2.0 2	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 dokumen	1 dokumen	61.825.800	1 dokumen	65.317.000	1 dokumen	78.486.000	1 dokumen	117.325.000	1 dokumen	157.696.000	1 dokumen	480.649.800
2	16	03	2.0 2	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	N/A	1 dokumen	79.000.000	1 dokumen	85.000.000	1 dokumen	92.384.000	1 dokumen	135.000.000	1 dokumen	187.317.000	1 dokumen	578.701.000
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK														
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan pembangunan	38%	45%	106.896.426	50%	137.913.555	60,00	145.815.369	70,00	217.714.300	80,00	393.157.351	80,00	1.001.496.999
2	20	02	2.0 1		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota	1 dokumen	1 dokumen	106.896.426	1 dokumen	137.913.555	1 dokumen	145.815.369	1 dokumen	217.714.300	1 dokumen	393.157.351	1 dokumen	



2	20	02	2.0 1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3 dokumen	3 dokumen	81.638.118	3 dokumen	95.326.282	3 dokumen	97.360.995	3 dokumen	136.271.095	3 dokumen	220.259.117	3 dokumen	630.855.609
2	20	02	2.0 1	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	N/A	5 orang	25.258.307	5 orang	27.587.272	5 orang	30.454.374	5 orang	45.443.204	5 orang	102.898.234	25 orang	231.641.391
2	20	02	2.0 1	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	N/A	-		1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	18.000.000	1 dokumen	36.000.000	1 dokumen	70.000.000,00	1 dokumen	139.000.000
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN														
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	N/a	10%	71.264.284	15%	91.942.370	20%	97.210.246	25%	145.142.866	30%	262.104.900	30%	667.664.666
						Persentase aplikasi persandian yang diterapkan dalam SPBE													
						Persentase aplikasi persandian yang diterapkan dalam SPBE	10,00	20%		30,00		40%		50%		60%		60%	



2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Hasil Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	N/A	1 dokumen	71.264.284	1 dokumen	91.942.370	1 dokumen	97.210.246	1 dokumen	145.142.866	1 dokumen	262.104.900	1 dokumen	667.664.666
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	-	-	1 Laporan	31.000.000	1 Laporan	33.000.000	1 Laporan	45.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	209.000.000
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	1 OPD	2 OPD	71.264.284	20 OPD	60.942.370	25 OPD	64.210.246	30 OPD	100.142.866	41 OPD	162.104.900	41 OPD	458.664.666

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Diskominfo Kabupaten Manggarai Barat dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 - 2026, maka dalam penyusunannya Dokumen Perencanaan Jangka Menengah tersebut harus menjadi acuan dalam penyusunan Renstra, artinya indikator kinerja Diskominfo Kabupaten Manggarai Barat harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Diskominfo yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Diskominfo berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke-5 dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
				Target	Target	Target	Target	Target	
Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.15	Indeks	2,75	3,05	3,35	3,65	3,95	3,95

Sejalan dengan Indikator Kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, Program-program yang dilaksanakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026, dan sesuai dengan urusan dapat dilihat pada Tabel 7.2 sebagai berikut :



Tabel 7.2
Indikator Menurut Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome Pemerintah Daerah

No	Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
10	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika								
10,1	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	92	100	100	100	100	100	100
10,2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	25	50	60	75	85	100	100
10,3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah	Persen	53	62	70	73	78	80	80
14	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik								
14,1	Persentase OPD yang menggunakan statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	38	45	50	60	70	80	80
14,2	Persentase OPD yang menggunakan statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	38	45	50	60	70	80	80
15	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian								
15,1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	10	15	20	25	30	35	35



Tabel 7.3
Indikator Menurut Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kode					Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun (2020)	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangk at Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target	Target	Target	Target	Target	Target	
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM)	N/A	60%	70%	80%	90%	100%	100%
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
2	16	02	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	N/A	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen hasil Pelayanan Informasi Publik	1 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	50 dokumen
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	N/A	5 Orang	4 Orang	3 Orang	6 Orang	15 Orang	32 Orang
2	16	02	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	N/A	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen



2	16	02	2.01	12	Penyelenggara n Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasi n Informasi Program atau Kebijakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
2	16	03			PROGRAM PENGELOAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase layanan administrasi pemerintah yang terintegrasi	25% 40%	50% 50%	60% 60%	75% 75%	85% 85%	100% 100%	100% 100%
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko ta	Prosentase Domain dan Sub Domain dikelola dengan baik	100	-	100%	100%	100%	100%	100%
2	16	03	2.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kot a	Jumlah Pendaftaran nama domain pemerintah Kabupaten/Kota	1	-	169 domain	13 domain	10 domain	10 domain	202
2	16	03	2.01	02	Penatalaksana an dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggara n Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	N/A	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
2	16	03	2.02		Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko ta	Terselenggarany a Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	16	03	2.02	01	Penatalaksana an dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggara n Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang dikelola	N/A	1	1	1	1	1	1
2	16	03	2.02	04	Penyelenggara n Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	N/A	5 Aplikasi	5 Aplikasi	5 Aplikasi	5 Aplikasi	5 Aplikasi	5 Aplikasi



2	16	03	2.02	08	Penyelenggara n Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	N/A	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	5 layanan
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Master Plan Smart City	N/A	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	8 dokumen
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
2	16	03	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	N/A	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
2	20	02			PROGRAM PENYELENGG ARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan pembangunan	38%	45%	50%	60,00	70,00	80,00	80,00
2	20	02	2.01		Penyelenggara an Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggara n Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	1 dokumen
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
2	20	02	2.01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	N/A	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	25 orang
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	N/A	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													
2	21	02			PROGRAM PENYELENGG ARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah Persentase aplikasi persandian yang diterapkan dalam SPBE	N/a	10%	15%	20%	25%	30%	30%
						Persentase aplikasi persandian yang diterapkan dalam SPBE	10,00	20%	30,00	40%	50%	60%	60%



2	21	02	2.01		Penyelenggara an Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Hasil Penyelenggaraa n Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	N/A	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	-	'1 Laporan	'1 Laporan	'1 Laporan	'1 Laporan	'1 Laporan
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	1 OPD	2 OPD	20 OPD	25 OPD	30 OPD	41 OPD	41 OPD



BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021-2026, merupakan rencana tindak seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kurun waktu lima tahun ke depan untuk mencapai tujuan dalam rangka mewujudkan visi, misi yang telah ditetapkan dengan merujuk dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus bisa dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik, dan seluruh komponen yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika harus ikut terlibat langsung dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuannya walaupun ketersediaan Sumber Daya Manusia yang ada sangat terbatas.

Akhirnya, semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan – tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan *good governance* guna menuju terwujudnya masyarakat Manggarai Barat yang informatif, mandiri dan beretika melalui Komunikasi dan Informatika.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Manggarai Barat,



Paulus Setahu S. Sos

Pembina Tk. I

NIP. 196806292000121004